

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pariwisata adalah sektor jasa yang mendapat perhatian penting, karena dari pariwisata diharapkan dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi secara cepat dan merata, khususnya perekonomian masyarakat lokal. Untuk itu pariwisata perlu didorong pembangunannya lebih terarah dan terencana. Pariwisata sebagai industri jasa yang multidimensi dan memiliki jaringan industry, serta memiliki rantai yang sangat panjang ke berbagai daerah dan menjangkau sektor formal maupun informal. Sebagai industri jasa, pariwisata akan lebih menitikberatkan pada tingkat kepuasan bagi pemakainya atau wisatawan. Pariwisata merupakan suatu kegiatan kemanusiaan berupa hubungan antarorang baik dari negara geografis yang terbatas. di dalamnya termasuk tinggal untuk sementara waktu di daerah lain atau negara lain atau benua lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan kecuali kegiatan untuk memperoleh penghasilan, meskipun pada perkembangan selanjutnya batasan “memperoleh penghasilan” menjadi kabur.

Pembangunan pariwisata diarahkan pada pembentukan destinasi-destinasi yang mengandung beberapa unsur yaitu: adanya aksesibilitas yang baik, adanya objek yang menarik, adanya permintaan pasar, dan adanya masyarakat yang mendapatkan manfaatnya, sehingga pembangunan pariwisata diharapkan tidak hanya dalam bentuk fisik seperti pembangunan gedung, taman-taman yang indah dan sebagainya, tetapi juga berupa pembangunan mental pada masyarakatnya, sehingga tingkah laku masyarakat setempat dapat mencerminkan pariwisata.

Pemerintah Indonesia telah menangani sektor kepariwisataan sejak awal kemerdekaan, sejak lahirnya Yayasan Tourisme Indonesia pada tahun 1955. Meskipun demikian, harus diakui

bahwa pariwisata belum berkembang sebagaimana diharapkan. Bagi wisatawan nusantara, berwisata masih terbatas daya jelajahnya sebagai akibat sebagian besar penduduk belum memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk menunjang hasratnya berwisata. Para wisatawan nusantara sebagian besar adalah onvensi atau dinas, artinya berwisata sebagai ‘sambilan’ di sela-sela waktu dinas atau konferensi, memanfaatkan waktu istirahat atau ‘menciptakan’ waktu luang di sela-sela kegiatan utama. Destinasi pariwisata seringkali berada tidak hanya pada satu wilayah administrative, tetapi dapat berada di lebih dari satu wilayah administratif baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi.

Jawa barat merupakan provinsi pertama yang dibentuk di Indonesia. Jawa barat terletak di bagian barat pulau jawa. Wialayah bagian utara berbatasan dengan laut jawa, sebelah timur berbatasan dengan jawa tengah,sebelah selatan berbatasan dengan samudera hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan banten dan DKI Jakarta. Jawa barat merupakan provinsi yang memiliki keindahan alam yang indah dan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, sumber daya hutan sumber daya air, sumber daya alam, pemanfaatan lahan, sumber daya pesisir atau laut dan memiliki banyak objek wisata yang beragam, baik wisata alam, budaya maupun sejarah.

Pemerintah merupakan faktor penting dalam hal manajerial birokrasi dan mengolah informasi selain dari pada itu pemerintah selaku pemangku kebijakan memiliki kewenangan atas kebijakan otonomi daerah yang berkaitan dengan sektor swasta dan peningkatan kesejahteraan. Dengan lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah, daerah memiliki kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi pembangunan yang dimiliki daerah. Salah satu contoh otonomi daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bandung yang berlandaskan Undang-undang No.12 Tahun 2007. Kabupaten Bandung Barat berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur.

Jika dilihat dari sektor pariwisata, Kabupaten Bandung Barat memiliki keragaman objek wisata alam maupun binaan yang apabila dikelola dengan baik dapat membangkitkan sektor perekonomian demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa objek wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan satu objek wisata yang dialih kelola oleh pihak swasta yaitu: Situ Ciburuy di Padalarang, Gua Pawon di Cipatat dan Curug Malela di Kecamatan Rongga sedangkan Maribaya Hot Spring and Resort dikelola oleh pihak swasta setelah dikerjasamakan dengan pihak ketiga, PT Akurasi Kuat Mega sejak bulan april 2013. Tiga obojek wisata tersebut merupakan objek wisata unggulan di Kabupaten Bandung Barat dan satu objek wisata yang dikerjasamakan dengan pihak swasta.

Tabel 1.1

Jumlah Pengunjung Objek Wisata di Kabupaten Bandung Barat, 2008-2016

No	Tahun	Retribusi Kab. Bandung Barat	Jumlah Pengunjung Objek Wisata (Orang)				Keterangan
			Maribaya	Situ Ciburuy	Goa Pawon	Curug Malela	
1	2008	43.119	40.200	2.919	-	-	
2	2009	34.207	31.042	3.165	-	-	
3	2010	40.770	36.021	4.749	-	-	

4	2011	33.059	34.676	4.383	-	-	
5	2012	34.611	30.099	4.511	-	-	
6	2013	5.618	-	5.591	27	-	
7	2014	8.505	-	5.905	1.200	1.400	
8	2015	16.649	-	6.879	6.970	3000	
9	2016	15.940	-	7.300	6.840	1.800	

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat

Jika dilihat dari tabel data menunjukkan bahwa ada perbedaan jumlah kunjungan antara objek wisata maribaya dengan objek wisata situ ciburuy, goa pawon dan curug malela. Pada tahun 2008 menunjukkan objek wisata maribaya mencapai 40.200 bila dibandingkan dengan objek wisata situ ciburuy jumlah kunjungan hanya mencapai 2.919. kawasan objek wisata maribaya banyak dikunjungi wisatawan tapi kawasan objek wisata yang di kelola oleh Pemerintah jumlah kunjungannya hanya sedikit.

Melihat jumlah pengunjung di tiga objek wisata yang dikelola oleh pemerintah tersebut mengindikasikan bahwa ada persoalan. Adapun persoalan yang ada di tiga objek wisata ini yaitu: pertama, kurangnya penataan serta pengelolaan yang dilakukan oleh pemkab Bandung Barat salah satu contohnya adalah penataan di areal objek wisata masih belum memadai. Berbagai fasilitas seperti tempat parkir, toilet, dan tempat pedagang masih minim. (www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/10/04penataan-curug-malela-diharapkan-segera-rampung-410866. *Dilansir dari Pikiran Rakyat tanggal 4 Oktober 2017*)

Permasalahan selanjutnya yaitu mengenai infrastruktur menurut Kepala Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat menilai, pembangunan infrastruktur untuk aksesibilitas menjadi tugas pemerintah daerah dalam membangun sektor pariwisata Kabupaten Bandung Barat. Seperti diketahui, infrastruktur yang kurang memadai tersebut berada di objek wisata Curug Malela di Rongga

dan Gua Pawon di Cipatat. Padahal, objek wisata alam tersebut memiliki daya Tarik yang tersendiri. (<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/09/18/infrastruktur-kurang-memadai-pariwisata-di-kbb-sulit-berkembang-409709>. Dilansir dari *Pikiran Rakyat* tanggal 18 September 2017)

Adanya persoalan infrastruktur serta kurangnya penataan dan pengelolaan pada objek wisata memberikan dampak terhadap penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Adanya penurunan jumlah pengunjung akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat. pemerintah Kabupaten Bandung Barat dinilai gagal dalam mengelola objek wisata milik pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari minimnya pendapatan asli daerah atau PAD dari tiga objek wisata yang dikelola Pemkab, yakni situ ciburuy, Gua Pawon, dan Curug Malela. Diketahui, PAD dari objek wisata Situ Ciburuy hanya Rp 28 juta per tahun, sedangkan Curug Malela dan Gua Pawon masing-masing hanya Rp 5 juta per tahun. (<http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/09/26/objek-wisata-yang-dikelola-pemkab-bandung-barat-sulit-berkembang-380851>. . Dilansir dari *Pikiran Rakyat* tanggal 26 September 2016)

Pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat memiliki peran yang besar dalam tata kelola objek wisata di Kabupaten Bandung Barat meskipun banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sendiri, namun dalam hal ini masih banyak masyarakat masih mengeluhkan tentang penataan dan pengelolaan objek wisata yang dikelola oleh pemerintah masih belum maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu Peneliti mengambil penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN PERDA NO 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT”.

B. Identifikasi Masalah

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan daerah pasti akan ditemukan permasalahan yang harus di selesaikan oleh seluruh pihak baik dari pemerintah, masyarakat maupun swasta. Dari uraian mengenai latar belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

1. Kurangnya penataan objek wisata yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraan kepariwisataan daerah
2. Sarana dan prasarana yang masih minim seperti infrastruktur yang belum memadai di beberapa objek wisata membuat sektor pariwisata di kabupaten Bandung Barat sulit berkembang
3. Kelembagaan yang belum optimal karena beberapa objek wisata kurang penanganan khusus antara pemerintah dan kabupaten Bandung Barat dan pihak investor

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bandung Barat?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perda No 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah di Kabupaten Bandung Barat?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bandung Barat
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perda No 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah di Kabupaten Bandung Barat

E. Kegunaan Penelitian

1. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dan menjadi ilmu yang berharga, serta dapat menjadi sumber literasi bagi pengembangan berbagai penelitian mengenai penyelenggaraan kepariwisataan daerah di kabupaten Bandung Barat.

2. Lembaga (Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat)

Diharapkan dapat menjadi masukan dan tambahan informasi bagi kantor dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Bandung Barat untuk mengatasi berbagai permasalahan dan dilemma yang dihadapi oleh pemerintah daerah sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik serta dapat membantu dalam memajukan kepariwisataan daerah khususnya kabupaten Bandung Barat.

3. Peneliti Lain

Dalam melakukan studi dari permasalahan yang telah di rumuskan dan perlu dilengkapi dengan kerangka pemikiran Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya di bidang kepariwisataan serta dapat menjadi bahan referensi untuk pengembagn penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

F. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bandung Barat peneliti membuat kerangka Pemikiran sebagai panduan sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai dengan baik.

Perkembangan seringkali dianggap dan diukur sebagai perkembangan sektor ekonomi saja, karena sektor ekonomi adalah salahsatu sektor yang perkembangannya dapat diukur secara kuantitatif. Berkaitan dengan kepariwisataan, sektor ekonomi dapat menjadi penegara (indicator) perkembangan suatu daerah yang menjadi destinasi wisata dan atau memiliki daya Tarik wisata.

Pariwisata di Kabupaten Bandung Barat merupakan salahsatu sektor yang mampu memberikan peningkatan PAD daerah. Melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pasal 3 Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk: meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

Dalam melakukan analisis Implementasi Kebijakan Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bandung Barat, peneliti menggunakan Model Kebijakan Merilee S. Grindle (1980), dalam (Leo Agustino, 2017: 142). Pendekatannya dikenal dengan nama *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan public dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut :

1. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
2. *Type of Benefits* (tipe manfaat)
3. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
4. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

5. *Program Implementor* (pelaksana program)
6. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

